

**BERITA ACARA  
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU  
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. HSS TAHUN 2017**

**Nomor : 900/372.a/BAKEUDA**

Pada hari ini Jum'at, Tanggal sepuluh Bulan Maret Tahun 2017, kami Tim Koordinasi Verifikasi Renstra Organisasi Perangkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 188.45/070/KUM/2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Kordinasi Verifikasi Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :

**I. VISI**

**a. Uraian Visi Sebelum dan setelah Reviu**

<b>VISI</b>
<b>Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel</b>

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Visi**

--

**c. Uraian Visi Setelah Reviu**

<b>VISI (Setelah Reviu)</b>
<b>Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel</b>

## II. MISI

### a. Uraian Misi Sebelum Reviu

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>
<b>Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel</b>	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
	2. Meningkatkan Pelayanan Publik
	3.

### b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Misi

<b>MISI</b>
1.
2.
3.

### c. Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

<b>MISI (setelah reviu)</b>
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Publik
3.
4.

## III. TUJUAN

### a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah
	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas
2. Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Tujuan**

1.
2.
3.
4.

**c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>TUJUAN (setelah reviu)</b>
1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

**IV. SASARAN**

**a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola keuangan dan daerah yang transparan, efektif dan efisien
3. Meningkatkan kualitas pelayanan public	Terwujudnya pelayanan publik yang prima

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Sasaran**

1.
2.
3.
4.
5.

**c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>SASARAN (setelah reviu)</b>
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

**V. INDIKATOR KINERJA SASARAN**

**a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Terwujudnya tata kelola keuangan dan daerah yang transparan, efektif dan efisien	1. Penyampaian Raperda APBD tepat waktu 2. Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu. 3. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP 4. Persentase jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat 5. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemkab. HSS
3. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Survey Kepuasan Masyarakat

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Indikator Kinerja**

1.
2.
3.
4.
5.
6.

**c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)</b>
1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	2. Persentasi SKPD Pengelola PAD Yg Mencapai Target Penerimaan.
3. Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu	3. Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD 4. Persentasi Penyerapan belanja langsung OPD
4. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP	5. Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu
5. Persentase jumlah tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	6. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah
6. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemkab. HSS	7. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat
8. Survey Kepuasan Masyarakat	7. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	8. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat
	9. Persentase Temuan Pemeriksaan BPK yg selesai ditindak lanjuti
	10. Persentase Pengaduan Masyarakat yagn ditindak lanjuti
	11. Hasil Evaluasi AKIP

**VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**a. Uraian IKU Sebelum Reviu**

<b>SASARAN</b>	<b>IKU</b>
1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2. Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Persentase penurunan tunggakan PAD

<b>SASARAN</b>	<b>IKU</b>
2. Terwujudnya Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah	1. Persentase penurunan jumlah temuan BPK 2. Persentase peningkatan penyerapan belanja 3. Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat
3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Survey Kepuasan Masyarakat

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang IKU**

1.
2.
3.
4.
5.
6.

**c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu**

<b>IKU (sebelum reviu)</b>	<b>IKU (setelah reviu)</b>
1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2. Persentasi SKPD Pengelola PAD Yg Mencapai Target Penerimaan
3. Persentase penurunan tunggakan PAD	3. Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD.
4. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Persentase peningkatan penyerapan belanja	5. Persentasi Penyerapan belanja langsung OPD
6. Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	6. Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu
7. Survey Kepuasan Masyarakat	7. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat
	7. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	8. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat
	9. Persentase Temuan Pemeriksaan BPK yg selesai ditindak lanjuti
	10. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
	11. Hasil Evaluasi AKIP

**VII.FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS)dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Alasan (sebelum reviu)</b>	<b>Cara Pengukuran (sebelum reviu)</b>	<b>Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)</b>
1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Untuk mengukur keberhasilan meningkatkan PAD dari tahun sebelumnya	$\frac{\text{Penerimaan PAD Tahun (X)} - \text{Penerimaan PAD Tahun (X-1)}}{\text{Penerimaan PAD Tahun (X-1)}} \times 100\%$	Mengukur seberapa besar peningkatannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
2. Persentase capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Untuk mengetahui persentase tingkat keberhasilan pemenuhan target	$\frac{\text{Jumlah realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$	Mengukur keberhasilan pencapaian target penerimaan PAD
3. Persentase penurunan tunggakan PAD	Mengetahui kemampuan untuk menurunkan tunggakan PAD	$\frac{\text{Tunggakan PAD Tahun (X-1)} - \text{Tunggak PAD Tahun (X)}}{\text{Tunggakan PAD Tahun (X-1)}} \times 100\%$	Mengukur tingkat keberhasilan menurunkan jumlah tunggakan piutang Pendapatan Asli Daerah
4. Persentase penurunan jumlah temuan BPK	Tata kelola keuangan dan aset daerah dapat dinilai dari laporan keuangan yang telah diudit BPK	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK Tahun (X-1)} - \text{Temuan BPK Tahun (X)}}{\text{Jumlah temuan BPK Tahun (X-1)}} \times 100\%$	Semakin menurun persentase jumlah temuan BPK, maka semakin baik tata kelola keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan
5. Persentase peningkatan penyerapan belanja	Persentase penyerapan belanja mencerminkan : Tidak terjadi uang menganggur akibat besarnya SiLPA dan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan	$\frac{\text{Total Belanja Tahun (X)} - \text{Total Belanja Tahun (X-1)}}{\text{Total Belanja Tahun (X-1)}} \times 100\%$	Semakin tinggi serapan belanja, berarti kegiatan yang dianggarkan telah berjalan sesuai rencana, efektif dan efisien

6. Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	Salah satu ukuran keberhasilan tata kelola aset daerah adalah kelengkapan dokumen administrasi dan keamanan aset	Jumlah Tanah yang Bersertifikat X 100% di bagi Jumlah Tanah Milik Pemda Seluruhnya	Semakin meningkat jumlah tanah milik Pemda yang bersertifikat, semakin baik untuk kelengkapan dokumen dan pengamanan asset
7. Survey Kepuasan Masyarakat	Masyarakat penerima layanan dapat langsung memberikan penilaian berdasarkan kuesioner yang disampaikan	Nilai survey kepuasan masyarakat	Sesuai amanat UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka sebagai lembaga pelayanan pada masyarakat wajib memberikan pelayanan yang terbia kepada masyarakat.

**b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi IKS**


**c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu**

<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Alasan (setelah reviu)</b>	<b>Cara Pengukuran (setelah reviu)</b>	<b>Keterangan / Kriteria (setelah reviu)</b>
1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PAD yang ditetapkan Pemerintah Daerah	
2. Persentasi SKPD Pengelola PAD Yg Mencapai Target Penerimaan	Untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh SKPD Pengelola PAD	Jumlah SKPD Pengelola PAD yg Mencapai target dibagi Jumlah SKPD Pengelola PAD dikali 100	
3. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD	Untuk mengetahui Ketepatan Waktu dalam penyampaian Rancangan APBD	Sesuai Permendagri No. 13 Thn 2006 beserta perubahannya bahwa RAPB disampaikan paling lambat 9 bulan 7 hari	



4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Salah satu tolak ukur untuk mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Sesuai Permendagri No. 13 Thn 2006 beserta perubahannya bahwa Laporan Kuenagan disampaikan paling lambat 3 bulan ssetelah berakhirnya tahun anggaran	
5. Persentasi Realisasi belanja langsung OPD	Untuk Mengetahui Persentase Tingkat penyerapan belanja langsung	Realisasi belanja Langsung OPD dibagi Anggaran Belanja Langsung SKPD X 100%	
6. Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Jumlah SP2D yang sesuai sumber dana dan kode rekening dibagi Jumlah seluruh SP2D X 100%	
7. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	Salah satu ukuran keberhasilan tata kelola aset daerah adalah kelengkapan dokumen administrasi dan keamanan aset	Jumlah Tanah yang Bersertifikat di bagi Jumlah Tanah Pemda Seluruhnya X 100%	
8. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Salah satu ukuran keberhasilan tata kelola aset daerah adalah kelengkapan dokumen administrasi dan keamanan aset	Data Aset SIMDA BMD di bagi Data Aset di Neraca x 100%	
9. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Masyarakat penerima layanan dapat langsung memberikan penilaian berdasarkan kuesioner yang disampaikan	Nilai survey kepuasan masyarakat	
10. Persentase Temuan Pemeriksaan BPK yg selesai ditindak lanjuti	Untuk mencapai predikat WTP salah satu faktornya adalah tindaklanjut atas temuan pemeriksaan BPK	Jumlah temuan BPK yang selesai ditindak lanjuti di bagi Jumlah temuan BPK X 100%	
11. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	Masyarakat penerima layanan dapat menyampaikan keluhannya atas pelayanan SKPD	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti di bagi Jumlah seluruh Pengaduan Masyarakat X100%	
12. Hasil Evaluasi AKIP	AKIP dalah salah satu alat ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	

## VIII. TARGET KINERJA

### a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase peningkatan PAD	%				19,30	19,10	20	

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Persentase capaian penerimaan PAD	%				100	100	100	
3. Persentase penurunan tunggakan PAD	%				25	25	25	
4. Persentase Jlh Penurunan Temuan/ Rekomendasi BPK	%				20	100		
5. Persentase peningkatan penyerapan belanja	%				15,25			
6. Persentase Tanah Milik Pemda yang bersertifikat	%				89,76	94,88	100	
7. Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai				85	87	90	

**b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran**


**c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu**


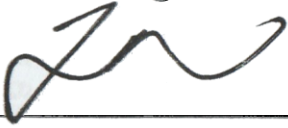


INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp				114.69 3.015. 251	120.427 .666.00 0	126.49 9.049.3 00	
2. Persentasi SKPD Pengelola PAD yang Mencapai Target Penerimaan					75 %	83 %	91 %	
3. Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD.	Waktu (Tgl)					31 Maret 2017	31 Maret 2018	
4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu (Tgl)					09 Okt. 2017	09 Okt. 2018	
5. Persentasi Penyerapan belanja langsung OPD	%					94	95	
6. Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu	%					100	100	
7. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	%				50,86	51	52	

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	%					100	100	
8. Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks					85	85	
9. Persentase Temuan Pemeriksaan BPK yg selesai ditindak lanjuti	%					100	100	
10. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	%					100	100	
11. Hasil Evaluasi AKIP	Predikat				B	B	BB	

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah 2014-2018 Hasil Reviu Tahun 2017**, adalah sebagaimana tabel berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2016)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
								2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)			(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	121.124.618.152	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp			114.693.015.152	121.124.618.152	127.180.870.060		
2.		Persentase SKPD Pengelola PAD yang mencapai target	83		Persentase SKPD Pengelola PAD yang mencapai target	%			75	83	91		
3.		Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD.			Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD.	Waktu				09 Oktober 2017	09 Oktober 2018	
4.		Persentase Penyerapan belanja langsung OPD	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu			28 Maret 2016	31 Maret 2017	31 Maret 2018	
5.		Persentase Waktu Penyelesaian SP2D	Persentase Penyerapan belanja langsung OPD			Persentase Penyerapan belanja langsung OPD	%			94	94	95	
6.		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu			Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap, sah, sesuai ketentuan dan tepat waktu	%			100	100	100	
7.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Milik Pemerintah Yang Bersertifikat	Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	%			50,86	51	52		

8.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Total BMD dengan Asset di Neraca	Data BMD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	%					100	100	100		
9.	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima	Survey Kepuasan Masyarakat	Quesioner SKM	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks					85	85	85		
10.		Tindak Lanjut Temuan BPK	Temuan/Rekomendasi BPK		Persentase Temuan Pemeriksaan BPK yg selesai ditindak lanjuti	%					100	100	100		
11.		Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti				Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	%					100	100	100	
12.		Hasil Evaluasi AKIP	Kinerja SKPD			Hasil Evaluasi AKIP						B	BB	BB	

 <p>Mengetahui : Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan</p> <p>Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP Pembina Utama Muda NIP. 19660919 198602 1 004</p>	Hulu Sungai Selatan, 10 Maret 2017		
	Tim Reviu Renstra dan IKU Badan Keuangan Daerah		
		<b>Nama</b>	<b>Tandatangan</b>
	1. Ketua Tim	Iwan Friady	
	2. Anggota	Sudhono	
3. Anggota	H. Sugeng Arizanto		
4. NARASUMBER		